



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN**

JL. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38-A MEDAN 20132 – TELP (FAX) . 061-88360055, 88360056
Website : www.pt-medan.go.id – E-mail : sekretariat@pt-medan.go.id

Medan, 20 Mei 2025

Nomor : 3203 /KPT.W2.U/KP1.1.8/V/2025
Sifat : Terbatas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
di-
Simalungun

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Dihimbau agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan pedoman untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Atas perhatian dan kerjamanya disampaikan terima kasih.

Medan, 20 Mei 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN	Nomor	
		Satker	PN SIMALUNGUN
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MEDAN	Tanggal	20 MEI 2025
	Pengadilan Tinggi Medan Jl. Ngumban Surbakti No. 38 A Medan	Halaman	

NO	Komponen / Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Kinerja Tahun Sebelumnya	Nilai Kinerja 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	24
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,10	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,85	79,10
Predikat			BB	BB

I. Catatan Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

1	Pohon kinerja sudah tersedia namun masih belum menjelaskan keterkaitan antar bagian berjenjang dan crosscutting secara keseluruhan.
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih ada dokumen/kegiatan pendukung yang belum dilakukan Masih ada SOP yang Belum di tanda tangani oleh pimpinan
3	Belum ada SK Ketua PN terkait penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja
4	Dokumen LKJIP yang di upload pada website belum menunjukkan tanggal upload

B. Pengukuran Kinerja

1	Belum ada dan belum di tetapkan SK APIP.
2	Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen
3	Sudah ada SOP pengumpulan data capaian kinerja berkala namun belum di tanda tangani
4	Sudah bentuk Tim penyusun dan Reviu LKJIP, tim penyusun dan reviu IKU, Renstra namun belum dilengkapi dengan dokumen kegiatan yang sesuai dengan SK penunjukkan Ketua Pengadilan.
5	Belum Melampirkan Kebijakan Revisi Pusat

C. Pelaporan Kinerja

1	Belum ada Laporan Monev dari APIP
2	Reviu Laporan Kinerja telah dilaksanakan namun belum ada dokumentasi pelaksanaan reviu.
3	Belum ada perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Belum Mambandingkan TLHE AKIP Tahun-tahun sebelumnya
2	Satuan kerja belum memiliki pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

II. Rekomendasi Tim Penilai

A. Perencanaan Kinerja

1	Agar Membuat Pohon kinerja yang menampilkan Crosscutting dan casecadding
2	Agar SOP di tanda tangani

B. Pengukuran Kinerja

1	Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen
2	Agar dibuatkan SK Tim APIP.

C. Pelaporan Kinerja

1	Agar membuat laporan Monev capapin Kinerja oleh tim APIP secara Berkala.
2	Satuan kerja perlu menjelaskan adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.
3	Satuan kerja perlu melakukan perbandingan laporan kinerja dengan realisasi kinerja dengan pengadilan tingkat pertama lainnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Lakukan Perbandingan TLHE akip dengan tahun-tahun sebelumnya
2	Ditetapkan Pedoman Teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

Demikian hasil evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dipedomani untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya. Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP agar segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2025.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Medan, 20 Mei 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum